

**POLA AKOMODASI KOMUNIKASI ANTARA PEMBIMBING
DAN KLIEN PEMASYARAKATAN BEDA BUDAYA
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI
GUNA PERCEPATAN REINTEGRASI**

***THE PATTERNS OF COMMUNICATION ACCOMMODATION
BETWEEN PAROLE OFFICERS AND CLIENTS WITH
DIFFERENT CULTURE IN CLASS I PROBATION AND
PAROLE OFFICE OF MANOKWARI TO ACCELERATE
REINTEGRATION***

MARLIEN LANDE

E022211019



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**POLA AKOMODASI KOMUNIKASI ANTARA PEMBIMBING
DAN KLIEN PEMASYARAKATAN BEDA BUDAYA
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI
GUNA PERCEPATAN REINTEGRASI**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Komunikasi

Disusun dan Diajukan oleh:

MARLIEN LANDE
E022211019

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**POLA AKOMODASI KOMUNIKASI ANTARA PEMBIMBING
DAN KLIEN PEMASYARAKATAN BEDA BUDAYA
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI
GUNA PERCEPATAN REINTEGRASI**

Disusun dan diajukan oleh

MARLIEN LANDE

E022211019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **07 Juni 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



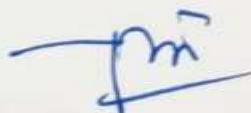
Prof. Dr. Tuti Bahfarti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197306172006042001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Muhammad Farid, M.Si.
NIP. 196107161987021001

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Farid, M.Si.
NIP. 196107161987021001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phl. Sukri, SIP., M.Si.
NIP. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARLIEN LANDE**

NIM : **E022211019**

Program Studi : **ILMU KOMUNIKASI**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Marlien Lande

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus oleh karena anugerah dan kasih setiaNYA yang melimpah dan selalu baru di setiap hidup dan kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Pola Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien Pemasyarakatan Beda Budaya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari Guna Percepatan Reintegrasi” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan hormat sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Tuti Bahfiarti, S. Sos., M. Si. selaku pembimbing I dan Dr. H. Muhammad Farid, M.Si., selaku pembimbing II sekaligus Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, dukungan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan hormat sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Akbar, M. Si., Dr. Sudirman Karnay, M.Si., dan Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si selaku dewan penguji yang telah memberikan waktu, masukan, koreksi dan saran guna menjadikan tesis ini lebih baik lagi.

Berada di titik ini tentulah membutuhkan banyak usaha dan perjuangan. Namun, penulis menyadari karena anugerah Bapa di Surga yang membuat penulis mampu mencapai keberhasilan ini serta kasih Bapa semata yang telah menempatkan orang-orang baik disekitar penulis yang terus membantu serta mendoakan penulis. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang baik yang hadir dalam dua tahun perjuangan ini:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas kepercayaan dan kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Papua Barat atas perkenannya memberikan tugas belajar melalui program Beasiswa Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik dan bersedia berbagi informasi sebagai bahan penelitian penulis.
3. Segenap Dosen magister Ilmu Komunikasi yang telah membagikan ilmunya selama proses perkuliahan.
4. Seluruh staf administrasi FISIP dan Prodi Magister Ilmu Komunikasi yang selalu bersedia direpotkan namun senantiasa memberikan pelayanan prima.
5. Keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dan Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari atas kesediaannya memberikan izin penelitian khususnya buat informan internal yang bersedia diganggu. Terima kasih juga buat para informan eksternal: Titik terendah di hidup kalian kiranya menjadi pijakan kuat untuk melompat ke tempat yang lebih baik.

6. Sahabat-sahabat MIKOM 2021 baik kelas KOMINFO dan kelas regular, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan dorongan yang begitu luar biasa. Perjuangan ini akan menjadi memori indah yang suatu saat menjadi menarik untuk diceritakan kembali.
7. Keluarga besar penulis: mama dan papa terkasih yang senantiasa menyebutkan namaku dalam tiap doanya. Terima kasih bersedia menjaga cucu-cucumu yang unik sehingga anakmu ini bisa fokus menjalani masa tugas belajar. Terima kasih juga untuk mama dan bapa mantu. kakakku-Dian, adikku Musa, serta ipar-ipar atas dukungan yang diberikan.
8. Keluarga kecilku, suamiku Nanang Wijaya Kusuma dan anak-anakku Keysha Angelique, Lidya Natalie dan Noel Wijaya. Terima kasih untuk doa, dukungan dan semangat yang kalian berikan. *Till we gather again.*
9. Semua pihak yang ikut serta membantu sejak proses perkuliahan sampai tersusunnya tesis ini.

segala hal baik yang diberikan kepada penulis selama dua tahun ini kiranya Tuhan saja yang membalasnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritikan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Tuhan Yesus memberkati.

Makassar, 24 Mei 2023

Marlien Lande

ABSTRAK

MARLIEN LANDE. Pola Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien Pemasarakatan Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari Guna Percepatan Reintegrasi (dibimbing oleh Tuti Bahfiarti dan Muhammad Farid).

Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bentuk konvergensi komunikasi antara pembimbing dan klien pemasarakatan beda budaya di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manokwari; (2) bentuk divergensi pada komunikasi antara pembimbing dan klien pemasarakatan beda budaya di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manokwari; (3) penyesuaian berlebihan pada komunikasi antara pembimbing dan klien pemasarakatan beda budaya di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manokwari; dan (4) pola akomodasi komunikasi pembimbing dan klien pemasarakatan beda budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari guna percepatan reintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi nonpartisipan terhadap informan internal (pembimbing kemasyarakatan) dan eksternal (klien pemasarakatan) di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Manokwari. Teknik penarikan informan adalah sampling purposif berdasarkan syarat seperti beda budaya antarinforman. Data sekunder diperoleh melalui referensi peraturan perundangan yang berlaku, buku *online* maupun cetak, dan karya ilmiah. Penganalisan data menggunakan analisis Miles dan Huberman, yakni melalui tahap-tahap pengumpulan data, pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga bentuk akomodasi komunikasi tercipta antara pembimbing dan klien pemasarakatan, yakni (1) konvergensi dialek Papua untuk mencapai kesamaan makna; (2) divergensi aksen dan dialek terjadi akibat ketidakmampuan menyesuaikan; (3) penyesuaian berlebihan dilakukan secara tidak sadar oleh pembimbing, namun klien tidak dapat menghindarinya; dan (4) pola akomodasi komunikasi menunjukkan para informan saling melakukan akomodasi. Rekomendasi penelitian ini adalah pembimbing selayaknya memiliki pemahaman budaya klien sehingga komunikasi menjadi efektif dan tujuan reintegrasi sosial tercapai dengan maksimal.

Kata kunci: akomodasi komunikasi, pembimbing kemasyarakatan, klien pemasarakatan, dialek



ABSTRACT

MARLIEN LANDE. *The Patterns of Communication Accommodation between Parole Officers and Clients with Different Culture in Class I Probation and Parole Office of Manokwari to Accelerate Reintegration* (supervised by Tuti Bahfiarti and Muhammad Farid)

This study aims to (1) analyze the form of convergence of communication between parole officers and clients with different culture in Class I Probation and Parole Office of Manokwari (2) analyze the form of divergence in communication between parole officers and clients with different culture in Class I Probation and Parole Office of Manokwari. (3) analyze the over-accommodation of communication between the parole officer and clients with different culture in Class I Probation and Parole Office of Manokwari. (4) analyze the patterns of communication accommodation between parole officers and clients with different culture in Class I Probation and Parole Office of Manokwari to accelerate reintegration. This study used a qualitative phenomenological approach. Data collection techniques used were in-depth interviews and non-participant observation of internal (parole officers) and external (correlational clients) informants in Class I Probation and Parole Office of Manokwari. The informants were selected using purposive sampling technique based on conditions such as cultural differences among the informants. Secondary data were obtained through references to applicable laws and regulations, online and printed books, and scientific papers. Data analysis used Miles and Huberman's analysis, i.e. the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that there are three accommodations between parole officers and clients, namely (1) convergence of Papuan dialects to achieve the same meaning, (2) divergence of accents and dialects occurring due to inability to adjust, (3) excessive adaptation carried out unconsciously by the parole officer but the client could not avoid it, (4) the pattern of communication accommodation showing that the informants make accommodations for each other. The recommendation of this research is that mentors should have an understanding of the clients' culture, so communication becomes effective and social reintegration goals are achieved optimally.

Keywords: communication accommodation, parole officer, correctional client, dialect



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Tinjauan Konsep	13
1. Konsep Akomodasi Komunikasi	13
2. Budaya dan Komunikasi	14

3. Budaya dan Akomodasi	16
4. Konsep Narapidana	17
5. Konsep Konseling Pembimbingan	18
C. Tinjauan Teoritis	21
1. Teori Akomodasi Komunikasi	21
2. Teori Linguistik (Bahasa)	26
3. Teori Pengurangan Ketidakpastian.....	29
D. Kerangka Pemikiran	35
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Penarikan Informan	41
F. Teknik Analisis Data	43
G. Pengecekan Validitas Temuan	44
H. Tahapan Penelitian	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49

B. Hasil Penelitian	58
1. Karakteristik Informan Penelitian	58
2. Bentuk Konvergensi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari	76
3. Bentuk Divergensi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari	80
4. Bentuk Penyesuaian Berlebihan antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari	85
5. Pola Akomodasi Komunikasi	86
C. Pembahasan	89
1. Bentuk Konvergensi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari	89
2. Bentuk Divergensi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari	94
3. Bentuk Penyesuaian Berlebihan antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari	97
4. Pola Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari guna Percepatan Reintegrasi	101
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah narapidana dan tahanan se-Provinsi Papua Barat	5
Tabel 1.2	Jumlah Pembimbing (PK) dan Narapidana (Klien) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari	6
Tabel 3.3	Tahapan dan waktu penelitian	46
Tabel 4.4	Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan di Papua Barat	49
Tabel 4.5	Tabel Jumlah Pegawai Bapas Manokwari	50
Tabel 4.6	Profil Informan Internal	58
Tabel 4.7	Profil Informan Eksternal	65
Tabel 4.8	Tabel Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien Orang Asli Papua	87
Tabel 4.9	Tabel Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien pendatang	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tangkapan layar sdppublik.kemenkumham.go.id	5
Gambar 2.2	Kerangka pemikiran	36
Gambar 3.3	Analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014)	44
Gambar 4.4	Gedung Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari.....	48
Gambar 4.5	Wilayah Kerja Bapas Kelas I Manokwari.....	49
Gambar 4.6	Struktur Organisasi Bapas Manokwari	51
Gambar 4.7	Pembimbingan Kemandirian	53
Gambar 4.8	Pembimbingan Kemandirian bersama Pokmas Perikanan Manokwari	53
Gambar 4.9	Pembimbingan Kemandirian bersama Pokmas BPTP-PB Manokwari	54
Gambar 4.10	Pembimbingan Kepribadian (Wajib Lapor)	54
Gambar 4.11	Alur Layanan Bimbingan Klien Dewasa	56
Gambar 4.12	Pola Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien Pemasarakatan	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kepulauan, Indonesia memiliki 1.340 kelompok etnik atau suku bangsa yang menjadikannya sarat akan kekayaan budaya. Suku-suku ini tersebar di sepanjang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi lebih kurang 17.000 pulau besar serta kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari kerjasama antara BPS (Badan Pusat Statistik) dan *ISEAS (Institute of South East Asian Studies)*, ditemukan sekitar 633 suku yang merupakan hasil pengelompokan atas suku dan subsuku di Indonesia (Japar dkk: 2020).

Keberagaman suku di Indonesia menjadikan keberagaman budaya yang majemuk. Di mana budaya yang kita miliki saat ini merupakan *legacy* (warisan) dari nenek moyang kita yang perlu dijaga dan dilestarikan karena budaya ini merupakan identitas yang kita bawa sejak lahir. Bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan dapat diartikan sebagai instrument atau bentuk kultur yang digunakan untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan antar sesama manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi antarpersonal. Bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang multietnis. Selain bahasa, tiap daerah juga mempunyai aksen dan dialek yang khas. Dikutip dari

kompas.com, terdapat sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia (sumber: labbineka.kemdikbud.go.id)

Dialek merupakan variasi bahasa yang berbeda-beda pemakaiannya menurut daerah sang komunikator berasal. Dialek dapat dikenali melalui nada, irama, dan intonasi serta penambahan kata-kata tertentu. Dialek dari Toraja, contohnya: saat mengajak seseorang makan, orang Toraja menggunakan penambahan *mi* dalam kalimat “makan *mi*” meskipun yang dimakan bukanlah mie. Ciri inilah yang merupakan salah satu bentuk identitas diri dari manusia. bagi pendatang (*outcomers*) ajakan makan *mi* dapat diartikan bahwa lauk yang akan disantap adalah makanan yang terbuat dari tepung.

Contoh lainnya yakni penggunaan bahasa dengan menggunakan dialek wilayah timur Indonesia yakni dari Tanah Papua. “*Kawan, Ko pi?*” bagi pendatang, hal tersebut diartikan bahwa sang komunikator meminta atau bertanya di mana kopi (minuman) untuknya padahal maksud dari komunikator adalah menanyakan kemana sang komunikator hendak pergi.

Perbedaan penggunaan bahasa inilah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi beberapa instansi pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan publik mencoba untuk memperkenalkan ragam budaya bahasa yang ada di wilayah NKRI. Salah satu contoh yakni penerapan bahasa daerah pada beberapa bandar udara (Bandara) baik bandara Internasional maupun domestik seperti: Bandara Adisutjipto-Yogyakarta, Bandara Hasanuddin-Makassar, Bandara Ngurah Rai-Bali, Bandara Sam

Ratulangi–Manado, Bandara H. Aroeppala–Kepulauan Selayar dan Bandara Rendani–Manokwari.

Tidak hanya itu, beberapa maskapai menggunakan bahasa saat memberikan pengumuman oleh awak penerbangan saat akan lepas landas dan mendarat. Bahasa yang digunakan mengakomodasi Bahasa daerah di mana pesawat tersebut berada.

Pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi publik sebagaimana tertera dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia disebutkan bahwa: *“Dalam hal diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia.”*

Pelayanan administrasi publik diberikan oleh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam bidang pemasyarakatan ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawahi 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yakni Lembaga Pemasyarakatan (LP), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Balai Pemasyarakatan

(BAPAS), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN).

Keenam UPT Pemasarakatan di atas, LAPAS, LPP, LPKA, BAPAS, dan RUTAN merupakan UPT yang langsung berhubungan atau menangani Warga Binaan Pemasarakatan. UPT tersebut melakukan pengawasan, pembinaan serta pembimbingan kepada warga binaan pemasarakatan (WBP) yang ada dalam wilayah kerjanya. Pembinaan diberikan pada saat WBP menjalani pidana di dalam Lembaga sedangkan pembimbingan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) saat WBP sedang menjalani pidana di luar lembaga namun tetap melaksanakan wajib lapor.

Bimbingan yang dilakukan merupakan bentuk komunikasi interpersonal dua arah di mana terdapat komunikasi antara dua orang yang salah satunya bertindak sebagai penutur/komunikator dan seorang lagi sebagai lawan tutur/komunikan yang jika diperlukan maka baik dapat berganti peran. PK dalam memberikan pembimbingan senantiasa diperhadapkan dengan WBP yang berbeda jenis kejahatan, lama pidana bahkan budaya.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti dari operator aplikasi database pemasarakatan, jumlah WBP yang berada di wilayah Papua Barat sebagai berikut:

The screenshot shows a web interface for 'sdp publik' with a sidebar menu and a main data table. The table is filtered for 'KANWIL PAPUA BARAT', '2022', and 'Juli'. It displays 8 rows of data for different UPTs, with columns for 'No', 'UPT', 'Kanwil', and dates from 27 to 31. A summary row at the bottom shows a total of 8 rows.

No	UPT	Kanwil	27	28	29	30	31
1	LAPAS KELAS II B FAKFAK	KANWIL PAPUA BARAT	122	122	122	122	122
2	LAPAS KELAS II B MANOKWARI	KANWIL PAPUA BARAT	307	308	307	307	307
3	LAPAS KELAS II B SORONG	KANWIL PAPUA BARAT	555	558	560	550	550
4	LAPAS KELAS III KAIMANA	KANWIL PAPUA BARAT	54	54	54	54	54
5	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	KANWIL PAPUA BARAT	45	48	48	48	48
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS III MANOKWARI	KANWIL PAPUA BARAT	28	27	28	28	28
7	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MANOKWARI	KANWIL PAPUA BARAT	11	11	11	10	10
8	RUTAN KELAS II B BINTUNI	KANWIL PAPUA BARAT	78	78	78	78	78
			Σ	8(100%)	8(100%)	8(100%)	8(100%)

Gambar 1.1
Sumber: Tangkapan layar sdppublik.kemenkumham.go.id

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah WBP yang ada pada UPT Pemasyarakatan di Wilayah Papua Barat per tanggal 31 Juli 2022 adalah seribu dua ratus sembilan puluh enam WBP yang merupakan gabungan narapidana dan tahanan. Adapun sebaran narapidana dan tahanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah narapidana dan tahanan se-Provinsi Papua Barat

NO	UPT	Narapidana	Tahanan
1	Lapas Kelas IIB Fakfak	101	21
2	Lapas Kelas IIB Manokwari	308	89
3	Lapas Kelas IIB Sorong	438	121
4	Lapas Kelas III Kaimana	50	4
5	Lapas Kelas III Teminabuhan	37	11
6	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	20	8

NO	UPT	Narapidana	Tahanan
7	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Manokwari	5	5
8	Rutan Kelas IIB Bintuni	71	7
TOTAL		1.030	266

Sumber: divisi pemasyarakatan kanwil Papua Barat, olahan peneliti: 2022

Banyaknya jumlah WBP dapat diartikan bahwa ada beragam budaya yang eksis dalam Lapas. Hal tersebut bisa dikaitkan pula dengan berbondong-bondongnya masyarakat menuju ibukota provinsi yang usianya cukup muda tersebut untuk mengadu nasib. Mereka yang kurang beruntung bisa saja tergoda untuk melakukan tindak kejahatan yang berujung pada pidana di dalam Lapas.

Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) berdasarkan ketentuan yang ada, kemudian akan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Pembimbing) pada Balai Pemasyarakatan. Tabel pada halaman selanjutnya menyajikan data jumlah PK dan Narapidana berstatus klien pada tiga Bapas yang berada di provinsi Papua Barat:

Tabel 1.2 Jumlah Pembimbing (PK) dan Narapidana (Klien) pada Balai Pemasyarakatan di Wilayah Papua Barat

Nama UPT	Jumlah PK	Klien Dewasa				Klien Anak
		PB	CB	CMB	Asimilasi	
Bapas Kelas I Manokwari	12	145	2	-	42	2
Bapas Kelas II Sorong	9	79	5	-	101	-
Bapas Kelas II Fakfak	-	50	1	-	16	-
TOTAL	21	274	8	-	159	2

Sumber: Subseksi registrasi pada tiga Bapas, olahan peneliti: 2022

Jika melihat tabel di atas, diketahui perbandingan antara Pembimbing dan Narapidana yang terbesar ada pada Bapas Kelas I Manokwari yakni 1:12 yang berarti satu Pembimbing bertugas membimbing dua belas Narapidana yang bisa berasal dari budaya yang berbeda dengan Pembimbing.

Pada saat timbul komunikasi dengan kelompok atau individu yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, perlu dilakukan akomodasi komunikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Dalam hal ini, bimbingan yang diberikan dapat diterima secara efektif oleh Narapidana.

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pola Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari Guna Percepatan Reintegrasi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada subbab latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konvergensi yang dilakukan pada proses komunikasi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari?

2. Bagaimana bentuk divergensi yang dilakukan pada proses komunikasi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari?
3. Bagaimana bentuk penyesuaian berlebihan yang dilakukan pada proses komunikasi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari?
4. Bagaimana pola akomodasi komunikasi antara Pembimbing dan Narapidana Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari guna percepatan reintegrasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan bentuk konvergensi pada komunikasi antara Pembimbing dan klien pemsarakatan Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari.
2. Menganalisis dan menjelaskan bentuk divergensi pada komunikasi antara Pembimbing dan klien pemsarakatan Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari.
3. Menganalisis dan menjelaskan bentuk penyesuaian berlebihan pada komunikasi antara Pembimbing dan klien pemsarakatan Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari.

4. Menganalisis dan menjelaskan pola akomodasi komunikasi Pembimbing dan Klien Pemasarakatan Beda Budaya di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari Guna Percepatan Reintegrasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi serangkaian manfaat baik secara teoritis, akademik maupun sosial, antara lain:

1. Memberikan pandangan atau pengetahuan tambahan terkait akomodasi komunikasi pembimbing dan klien pemasarakatan yang memiliki kebudayaan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari
2. Memberikan tolak ukur baru bagi instansi Kementerian Hukum dan HAM secara umum dan secara khusus akan pentingnya akomodasi komunikasi dalam memberikan pelayanan Kemasyarakatan.
3. Menjadi sumber rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya di khususnya bidang komunikasi.
4. Memperkaya atau menambah wawasan pembaca terkait kebudayaan khususnya ragam budaya yang dapat dilihat melalui penggunaan bahasa oleh masyarakat yang ada di Papua Barat sehingga pembaca dapat lebih mengenal dan mencintai budaya bangsa Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan teori akomodasi komunikasi, dan komunikasi pembimbingan di Balai Pemasyarakatan. Peneliti kemudian menggunakan penelitian-penelitian yang ada sebagai pembanding untuk menentukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

Penelitian pertama adalah tesis oleh Hasminah Said tahun 2020 dengan judul: Akomodasi Komunikasi Bahasa Bugis Konjo dalam Berinteraksi dengan Masyarakat Pendatang di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan di Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan menggunakan pendekatan studi etnografi versi Dell Hymes. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Akomodasi Komunikasi oleh Howard Giles. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Dentong atau Bentong (istilah lain dari bahasa Konjo) merupakan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan masyarakat pendatang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa cara beradaptasi masyarakat bugis Konjo dengan masyarakat pendatang lebih dominan kepada model konvergensi.

Kedua, Akomodasi Komunikasi pada Mahasiswa Beda Budaya di Kota Kupang oleh Petrus Ana Andung, Ferly Tanggu Hana, dan Antonia Bara Benge Tani dalam Jurnal Manajemen Komunikasi: 2019. Penelitian ini menganalisis pengalaman akomodasi mahasiswa perantau (etnis Manggarai) dengan mahasiswa tuan rumah (Kupang) di Universitas Nusa Cendana. Teori interaksi simbolik dengan metode fenomenologi digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian dan menggunakan teknik enam langkah menurut Cresswell. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mahasiswa etnis manggarai melakukan akomodasi komunikasi dengan bentuk konvergensi untuk berinteraksi dengan mahasiswa tuan rumah. Disamping itu, ditemukan bahwa kontruksi pemaknaan dilakukan oleh mahasiswa etnis Manggarai (mahasiswa perantau) sebagai pembawa perubahan dan pejuang ilmu bagi masyarakat di Kampung halaman.

Ketiga, tesis Pinandito Dhirotsaha Pramana tahun 2021 dengan judul: Akomodasi Komunikasi dalam Pengelolaan Kecemasan dan Ketidakpastian (Studi Fenomenologi Penyesuaian Komunikasi Pegawai Baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin Tahun 2021). Penelitian ini menggunakan teori *Anxiety and Uncertainty Management* oleh William B. Gudykunst sebagai *grand theory* dan teori Akomodasi Komunikasi (Howard Giles) sebagai teori pendukung. Pendekatan kualitatif dengan metode *interpretative phenomenological analysis* merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini yakni pegawai baru mendasarkan komunikasi interpersonal

dari kategori sosial lawan interaksinya. Bentuk kecemasan dan ketidakpastian antara berinteraksi dengan pegawai yang lebih senior maupun atasan dirasakan berbeda saat berinteraksi dengan wajib pajak. Untuk memperoleh efektifitas saat berkomunikasi, maka pegawai baru melakukan akomodasi komunikasi terhadap rekan kerja, pimpinan/atasan, maupun wajib pajak.

Keempat, jurnal berjudul Akomodasi Komunikasi Aparatur Sipil Negara Magang di Perusahaan Manufaktur oleh Irma Rachmawaty dan Effy Zalfiana Rusfian dalam Jurnal Komunikasi Global: 2021. Penelitian dilakukan untuk melihat akomodasi komunikasi yang dilakukan oleh peserta magang dan kendala yang dialami dalam proses akomodasi komunikasinya. Data yang dianalisis merujuk pada empat tahapan model Giles dan *Anxiety Uncertainty Management* (AUM) dengan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode studi kasus. Dari penelitian ditemukan bahwa peserta magang melakukan konvergensi, divergensi dan sedikit akomodasi berlebihan untuk menyesuaikan diri dengan pegawai perusahaan manufaktur tersebut.

Kelima, jurnal dengan judul: Adaptasi Komunikasi Masyarakat Asal Pulau Jawa di Kota Kupang (Studi pada Wali Murid di SDN Angkasa Kota Kupang) dalam Jurnal Comunicoo oleh Mas'amah tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami serta bagaimana mengatasi kendala yang ada dalam proses adaptasi orang Jawa di Kota Kupang. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah

adaptasi komunikasi, bentuk hubungan antar etnik serta *uncertainty reduction theory*. Metode yang digunakan adalah metode fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak memahami bahasa lokal merupakan salah satu penyebab informan (orang Jawa) mengalami kendala dalam berkomunikasi. Namun, kendala tersebut diatasi oleh informan dengan aktif mengikuti kegiatan arisan dan pengajian.

B. Tinjauan Konsep

1. Konsep Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi dan budaya jika diteliti bersama-sama akan melahirkan konsep komunikasi antar budaya di mana komunikasi tercipta antara dua orang atau lebih dengan melibatkan unsur budaya yang dimilikinya dapat diartikan sebagai komunikasi antarbudaya. Individu melibatkan budaya baik secara verbal maupun non-verbal pada saat komunikasi.

Liliweri (2007) mengatakan bahwa proses komunikasi antarbudaya merupakan interaksi antarpribadi dan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen atau sumber pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya.

Gudykunst dan Kim (dalam Liliweri: 2007) mengatakan bahwa aspek *culture*, *socioculture*, dan *psychoculture* dapat mempengaruhi keefektifan

terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan. Semakin besar perbedaan yang dimiliki maka semakin sulit untuk mencapai komunikasi yang efektif bahkan sulit untuk melakukan komunikasi. Sebaliknya semakin besar kemiripan yang dimiliki, maka semakin tinggilah komunikasi efektif dapat terjadi. Pengaruh tersebut timbul akibat kesamaan makna atas simbol-simbol yang digunakan saat berkomunikasi.

Liliweri (2007) lebih lanjut menjelaskan bahwa saat tercipta komunikasi antara komunikator dengan komunikan yang memiliki beda budaya, maka disitulah terjadi komunikasi antarbudaya. Bagaimana komunikator dengan budayanya membentuk pesan (*encoding*) dan bagaimana komunikan dengan budayanya mengartikan pesan (*decoding*) dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan secara lancar dan efektif.

2. Akomodasi Komunikasi

Dalam buku West dan Turner(2018) dikatakan bahwa berangkat dari pemikiran tentang “mobilitas aksen”, Howard Giles yang melihat situasi wawancara antara dua orang yang berbeda budaya, Giles menemukan bahwa dalam sebuah wawancara, salah satu individu yang diwawancarai cenderung mengakomodasi atau menyesuaikan diri dengan bahasa atau kebudayaan orang yang melakukan wawancara sebagai bentuk penghormatan. Oleh karena itu, Giles memperkenalkan akomodasi komunikasi yang didefinisikan sebagai upaya adaptasi atau penyesuaian

yang dilakukan seseorang saat berkomunikasi dengan orang lain yang mempunyai perbedaan dengan identitas diri yang dimilikinya.

Teori akomodasi komunikasi berdasar pada premis bahwa saat pembicara berinteraksi, maka mereka menyesuaikan pembicaraan, pola vokal/intonasi, serta tindak-tanduk seseorang untuk mengakomodasikan orang lain.

3. Budaya dan Komunikasi

Asal kata budaya atau kebudayaan yakni *buddhayah* (bentuk jamak dari *buddhi*–*sansekerta*) yang berarti akal atau budi dimaknai sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal dan budi manusia. Kebudayaan diartikan sebagai *culture* (bahasa Inggris) diterjemahkan sebagai kultur, dan *colere* (Latin) yang berarti mengerjakan atau mengolah, bahkan dapat diartikan sebagai pekerjaan bertani atau mengolah tanah (Syakhrani: 2022).

Communis (Latin) merupakan asal kata komunikasi yang artinya menciptakan kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi berasal juga dari kata *communico* yang berarti membagi (Cherry dalam Cangara: 2019). Oleh sarjana kekhususan komunikasi antarmanusia:

“Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain: serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu”. (Book dalam Cangara: 2019).

Selanjutnya seorang ahli sosiologi pedesaan dari Amerika, Everet M.

Rogers, juga memberikan definisi:

“Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.”

Selanjutnya, Edward T. Hall dalam bukunya *The Silent Language* berpendapat bahwa “Budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya”. Ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa komunikasi dan bahasa tidak dapat dipisahkan melainkan saling melengkapi dan terkait.

Budaya lahir dari komunikasi, dan pada kondisi tertentu budaya akan menciptakan pola komunikasi suatu anggota budaya tersebut. Budaya takkan bertahan tanpa komunikasi dan begitu pula dengan komunikasi. Budaya tidak dapat dipahami tanpa komunikasi dan komunikasi dengan dukungan budaya barulah dapat dipahami, Mulyana (dalam Sambas: 2016).

Clyde Kluckhohn dalam *Universal Categories of Culture*, 1953 (dalam Sambas: 2016) merumuskan unsur-unsur kebudayaan yaitu:

- a. Sistem teknologi (perlengkapan dan peralatan yang dapat membantu manusia);
- b. Sistem mata pencaharian masyarakat;
- c. Sistem kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat;
- d. Bahasa lisan dan tulisan;
- e. Hasil karya seni;
- f. Sistem pengetahuan; dan

g. Sistem religi (kepercayaan).

4. Budaya dan Akomodasi

Budaya merupakan suatu citra yang melekat pada diri seseorang. Ia ada dan memberi makna dalam kehidupan. Karena itu budaya merupakan identitas yang tidak dapat dipisahkan dari individu sebagai pelaku komunikasi.

Jerald G. dan Robert (dalam Sumarto: 2019) berpendapat bahwa “budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya.” Artinya bahwa budaya dapat kita lihat dalam perilaku kehidupan sehari-hari, namun dikontrol oleh mental program yang tertanam sangat dalam. Budaya bukanlah perilaku yang tampak semata, melainkan sangat dalam ditanamkan dalam diri masing-masing individu.

Budaya menurut Jeff Carffwright (dalam Sumarto: 2019) adalah penentu kuat keyakinan, sikap serta perilaku individu. Pengaruhnya diukur melalui bagaimana individu terdorong untuk merespons lingkungan budaya mereka.

Akibat dari budaya yang berbeda dari satu individu dengan individu lainnya, maka untuk melakukan komunikasi yang efektif, maka sangat penting bagi pelaku komunikasi untuk melakukan akomodasi.

Akomodasi dalam bingkai komunikasi merupakan suatu proses penyesuaian yang dilakukan antara seorang dengan orang lainnya pada

saat berkomunikasi. Penyesuaian dilakukan atas dasar adanya perbedaan antara kedua belah pihak. Perbedaan yang paling nyata yakni perbedaan budaya. Selanjutnya, pihak yang akan melakukan penyesuaian/adaptasi cenderung adalah pihak yang merasa diri kurang atau harus menghormati orang yang dihadapinya.

Akomodasi mampu memiliki peran krusial dalam komunikasi karena mampu memperkuat identitas sosial juga penyatuan, namun sebaliknya sanggup pula mempertegas perbedaan (West dan Turner, 2018).

5. Konsep Klien Pemasyarakatan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa sistem kepenjaraan yang dahulu dianut oleh Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, kini dianggap sudah tidak berlaku lagi karena tidak berlandaskan pada dasar negara.

Sejak UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diundangkan, sistem kepenjaraan kini berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang berarti bahwa tatanan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) telah berlandaskan Pancasila yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri WBP sehingga dapat menyadari kesalahannya, merubah diri menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat (re-integrasi).

Dalam ketentuan umum UU 12 tahun 1995 ayat (5), dan (9) berbunyi:

- (4) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- (5) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- (9) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.”

Selanjutnya dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa klien yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan antara lain:

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan

- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Dalam perkembangan selanjutnya, UU 12 tahun 1995 diganti dengan UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di mana disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang lebih sering disebut dengan Klien merupakan seseorang, baik dewasa maupun anak, yang sedang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan.

6. Konsep Konseling Pembimbingan

Crow & Crow (dalam Hamzah: 2020) bimbingan adalah salah satu metode pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada seseorang untuk mengambil keputusan dan memikul bebannya. Sementara itu, Mortensen (dalam Hamzah: 2020) menyatakan bahwa konseling ialah proses tatkala seseorang memberikan bantuan kepada orang lain untuk memahami serta mencari penyelesaian atas masalah yang dihadapinya. Sehingga bimbingan konseling dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang yang sedang menghadapi masalah untuk mencari bantuan baik kepada tenaga ahli maupun tidak untuk memperoleh nasihat agar dapat tegar menghadapi hidup serta mampu mencari penyelesaian yang terbaik atas masalah yang dihadapinya.

Bimbingan klien pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka mencegah kejahatan dan

bimbingan bagi pelanggar hukum yang ditujukan untuk kepentingan integrasi klien dengan masyarakat. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana, dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat (PP 31 tahun 1999).

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pasal 6 ayat (3) huruf b UU 12 tahun 1995 berbunyi:

- “(3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas;”

Bunyi pasal di atas juga senada dengan Bagian Ketiga Pasal 42 ayat (1) huruf b UU 12 tahun 1995 yang menjelaskan tentang siapa yang tergolong sebagai klien pemasarakatan.

Selanjutnya berdasarkan UU 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) dan (6) disebutkan bahwa:

- “(2) Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.
(6) Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS.

Pembimbingan ini wajib diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan secara bertahap berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data yang ada. Adapun tahapan pembimbingan tersebut secara jelas diatur pada Pasal 39 yakni:

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.

C. Tinjauan Teoritis

1. Teori Akomodasi Komunikasi

Dalam lingkup multikultural, seseorang cenderung melakukan penyesuaian atau adaptasi dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Adaptasi inilah yang merupakan inti dari Teori Akomodasi Komunikasi.

Teori Akomodasi Komunikasi (*Communication Accomodation Theory/CAT*) berpijak pada premis ketika individu berinteraksi, mereka melakukan perubahan pada pola vokal, gerak tubuh dan ucapan mereka untuk mengakomodasi individu lainnya. Giles dkk (dalam West dan Turner:

2018) mempercayai bahwa akomodasi tersebut atas beberapa alasan seperti: menghidupkan persetujuan pendengar, mendapatkan efisiensi dalam komunikasi, mempertegas posisi dominan, dan melindungi identitas sosial yang positif.

Teori ini awalnya dikenal sebagai Teori Akomodasi Wicara (*Speech Accomodation Theory*). CAT digagas oleh Howard Giles pada tahun 1973 dengan memperkenalkan model “mobilitas aksen” pada kondisi wawancara sebagai dasar pemikirannya. West & Turner dalam buku Pengantar Teori Komunikasi (2018) menjelaskan bahwa akomodasi diartikan sebagai kesanggupan untuk melakukan modifikasi, menyesuaikan ataupun menata perilaku saat menanggapi orang lain. Penyesuaian ini dilakukan dengan tidak sadar pada saat kita bercakap dengan orang lain yang memiliki identitas sosial yang berbeda dengan kita.

Teori ini juga dikaitkan dengan bidang psikologi sosial dan identitas sosial. Pada bidang psikologi sosial, akomodasi diartikan sebagai hal mendasar dalam konstruksi identitas. Pentingnya identitas diri dan identitas kelompok kemudian menjadi perhatian Henri Tajfel dan John Turner dan menjadikannya sebagai dasar dikembangkannya teori identitas sosial. Peneliti-peneliti ini mengungkapkan bahwa individu akan termotivasi bergabung dalam kelompok yang menurut mereka menarik dan dianggap dapat memberikan keuntungan bagi kelompok yang dimilikinya. Seseorang ketika memperoleh kesempatan akan cenderung mempersiapkan lebih

banyak sumber daya bagi kelompoknya daripada kelompok lain Worchel (dalam West dan Turner: 2018).

Terdapat empat asumsi dasar dalam teori akomodasi komunikasi, yakni:

- a. Asumsi pertama: persamaan dan perbedaan ucapan serta perilaku di dalam percakapan.

Pengalaman serta latar belakang yang berbeda menentukan sejauh mana individu akan mengakomodasi individu lainnya. Semakin tinggi persamaan sikap serta keyakinan kita dengan individu lain, semakin tertarik kita melakukan akomodasi.

- b. Asumsi kedua: cara di mana kita mempersepsikan ucapan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi suatu percakapan.

Pada asumsi ini, persepsi (menyimak kemudian mengartikan pesan) dan evaluasi (menilai percakapan) hadir. Hal tersebut senada dengan Dragojevich dkk (dalam West dan Turner: 2018) yang memandang bahwa akomodasi komunikasi merupakan teori yang terkait dengan cara individu memandang serta mengevaluasi percakapan yang terjadi. Dragojevich dkk juga menambahkan bagian penting lainnya yakni motivasi (hal yang mendorong individu untuk tetap terlibat dalam komunikasi dan melakukan akomodasi).

- c. Asumsi ketiga: bahasa dan perilaku memberikan informasi tentang status sosial dan kepemilikan kelompok.

Bahasa digunakan dalam satu percakapan pada akhirnya dapat memperlihatkan status individu lainnya. Dalam suatu kondisi di mana komunikasi terjadi, kelompok dominan akan bertindak sebagai penentu terhadap diterima atau tidaknya pandangan yang dimiliki oleh kelompok minoritas.

- d. Asumsi keempat: akomodasi bervariasi dalam tingkat kesesuaiannya dan norma memandu proses akomodasi.

Ekspektasi terhadap norma merupakan ekspektasi perilaku yang seharusnya dialami atau tidak dialami individu dalam berkomunikasi.

Orang yang muda harus menghormati orang yang lebih tua.

Ada tiga bentuk akomodasi komunikasi menurut Gallois dan Giles, 2015 (dalam West & Turner, 2018) yaitu:

Bentuk akomodasi yang pertama adalah konvergensi (*convergence*). Konvergensi diartikan sebagai adaptasi yang dilakukan dengan cara modifikasi sebagai bentuk akomodasi untuk mencapai komunikasi yang efisien. Giles dan Smith percaya bahwa ada faktor-faktor yang mempunyai ketertarikan untuk melakukan akomodasi antara lain: kemungkinan interaksi di masa mendatang, kemampuan berkomunikasi penutur, serta perbedaan status.

Bentuk kedua yakni divergensi (*divergence*). Divergensi merupakan bentuk akomodasi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan verbal dan non-verbal diantara para komunikator. Para komunikator tidak memiliki

kemauan untuk saling mengakomodasi. Alasan divergensi bermacam-macam.

Salah satunya bahwa seseorang ingin mempertegas identitas sosial yang dimilikinya. Divergensi merupakan satu cara bagi anggota komunitas untuk mempertahankan budaya sebagai identitas sosial. Hal tersebut oleh Giles dkk dinilai sebagai suatu strategi simbolis untuk mempertahankan identitas, menyatakan kebanggaan atas budaya dan menunjukkan keunikannya. Alasan lainnya berkaitan dengan kekuasaan dan peran yang berbeda dalam percakapan. Divergensi seperti ini tampak dalam percakapan antara dokter-pasien (Street dalam West dan Turner: 2018).

Bentuk yang ketiga yakni penyesuaian berlebihan (*overaccommodation*). Bentuk akomodasi ini nampak ketika komunikator secara berlebihan mencoba untuk melakukan akomodasi pada saat merespon seseorang sehingga terkesan memberi ejekan meskipun komunikator berniat baik saat melakukan akomodasi.

Menurut Jane Zuengler, 1991 (dalam West dan Turner: 2018), penyesuaian berlebihan dapat terjadi dalam tiga bentuk:

Pertama, penyesuaian berlebihan sensoris (*sensory overaccommodation*). Bentuk pertama ini terjadi ketika seorang komunikator secara berlebihan ingin mengadaptasi pada lawan bicara yang dianggap memiliki kekurangan dalam hal tertentu. Kekurangan disini mengacu pada keterbatasan bahasa dan fisik.

Kedua, penyesuaian berlebihan ketergantungan (*dependency overaccomodation*) yang terjadi ketika seorang penutur secara naluriah ataupun tidak, menempatkan individu lain pada kedudukan lebih rendah, sehingga lawan bicara terlihat seperti tergantung pada komunikator. Dalam akomodasi berlebihan jenis ini, komunikator juga meyakini bahwa komunikator memiliki kontrol atas percakapan sehingga menunjukkan kedudukan atau peran yang lebih tinggi.

Ketiga, penyesuaian berlebihan antar kelompok (*intergroup overaccomodation*). Tipe ketiga ini melibatkan komunikator dan komunikan yang berbeda kelompok/komunitas sehingga gagal melihat keunikan di antara keduanya. Hal utama dari akomodasi berlebihan adalah munculnya *stereotype*, dan pada akhirnya akan membuat jarak yang semakin jauh diantara para pelaku komunikasi.

Mengingat satu dari tujuan komunikasi adalah untuk memperoleh kesamaan makna yang dimaksudkan, maka akomodasi berlebihan dianggap sebagai penghalang yang berpengaruh dalam mencapai tujuan dari komunikasi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Zuengler (dalam West dan Turner: 2018) yang menyatakan bahwa terdapat implikasi yang serius dalam akomodasi berlebihan seperti tidak memiliki motivasi untuk mengetahui bahasa lebih lanjut, menjauhi percakapan, serta menciptakan sikap negatif atas komunikator dan masyarakat.

2. Teori Linguistik (Bahasa)

Istilah linguistik berasal *lingua* (bahasa latin) yang berarti bahasa. Kemudian dalam bahasa Perancis, diperkenalkan istilah *langage* secara umum digunakan sebagai wadah bagi konsep bahasa. Istilah yang mempelajari *langage* itu disebut *linguistique* dan dalam bahasa Inggris disebut *linguistics* yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. (Nengah: 2008)

Fachriyah Eva (dalam Jurnal Ilmu Komunikasi: 2022) menuliskan: “Gambaran budaya sebuah masyarakat dapat terlihat dari penggunaan bahasa masyarakat tersebut. Keadaan masyarakat pun dapat tergambar dari penggunaan bahasa. Sehingga bahasa dan budaya sangat erat berkaitan.”

Bahasa acapkali disebut sebagai alat komunikasi. Bahasa mempunyai makna yang kemudian dipahami dan dimengerti dalam interaksinya. Bahasa sebagai alat komunikasi merekatkan manusia dengan segala dinamikanya (Indah: 2017).

Bahasa digunakan manusia dalam berinteraksi satu sama lain sehingga harus dapat dipahami, benar, jujur, serta tepat sehingga dapat menciptakan komunikasi yang efektif (Habermas dalam Mukarom: 2020).

Chaer (dalam Effendi) menyebutkan sepuluh ciri-ciri bahasa, sebagai berikut:

1. Bahasa ialah sistem

Maksud sistem di sini ialah susunan keteraturan yang terpola dan membentuk makna. Bahasa merupakan kumpulan dari unsur atau komponen yang teratur sesuai pola yang tepat sehingga membentuk kesatuan yang bermakna.

2. Bahasa merupakan lambang

Bahasa juga terwujud dalam lambang/symbol yang terbentuk tidak secara langsung, lambang merujuk kepada sesuatu secara konvensional.

3. Bahasa ialah bunyi

Bunyi dalam bahasa ialah bunyi-bunyian yang dihasilkan alat ucap manusia. Dengkuran, batuk, bersin, dan teriakan tidak termasuk bahasa sebagai bunyi walaupun dikeluarkan oleh alat ucap manusia.

4. Bahasa memiliki makna (bermakna);

Satuan bahasa yang bermakna yakni wacana, kalimat, klausa, frase, kata dan morfem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa.

5. Bahasa itu arbitrer;

Bahasa itu arbitrer berarti tidak adanya hubungan yang wajib antara lambang bahasa berwujud bunyi dengan konsep atau pengertiannya.

6. Bahasa itu konvensional;

Meskipun bahasa bersifat arbitrer namun penggunaannya harus sesuai dengan kesepakatan secara umum oleh masyarakat pengguna bahasa.

7. Bahasa itu produktif;

Bahasa disebut produktif karena meskipun unsur bahasa terbatas tetapi dapat dibentuk satuan bahasa dengan jumlah yang relatif tak terbatas.

8. Bahasa itu unik dan universal;

Bahasa dikatakan unik karena tiap bahasa mempunyai sistem yang unik dan spesifik yang tidak dimiliki bahasa lain. Sistem yang unik itu terkait sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan sebagainya. Selain itu, bahasa disebut universal karena memiliki sifat bahasa yang berbeda satu dengan lainnya.

9. Bahasa itu dinamis;

Bahasa itu dinamis karena mempunyai hubungan dengan kegiatan dan gerak manusia. Manusia selalu melibatkan bahasa dalam kegiatannya. Perkembangan budaya dalam masyarakat akan membawa perkembangan pula kepada bahasanya.

10. Bahasa bersifat manusiawi dan bervariasi;

Bersifat manusiawi artinya bahasa dimiliki dan digunakan oleh manusia. Variasi bahasa tercipta oleh karena masyarakat yang menuturkan bahwa mempunyai identitas sosial yang berbeda.

Terdapat tiga macam variasi bahasa yakni idiolek, dialek, dan ragam. Variasi bahasa yang sifatnya perorangan di mana setiap individu memiliki ciri khasnya sendiri disebut idiolek. Variasi berikutnya yakni dialek di mana variasi bahasa merupakan variasi bahasa yang dimiliki oleh sekelompok orang pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan ragam merupakan

variasi bahasa yang penggunaannya dipakai berdasarkan situasi, keperluan dan keadaan tertentu yang di alami oleh penutur, apakah ragam baku atau tidak baku; formal atau tidak formal.

3. Teori Pengurangan Ketidakpastian (*Uncertainty Reduction Theory*)

Teori pengurangan ketidakpastian (*uncertainty reduction theory*) diperkenalkan pada tahun 1975 oleh Charles Berger dan Richard Calabrese. Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang akan berkomunikasi untuk mengurangi dugaan-dugaan yang dimiliki terhadap seorang lainnya khususnya saat bertemu pertama kalinya. Oleh karena itu, teori ini juga dikenal dengan sebutan teori interaksi awal.

Berger dan Calabrese juga mengutarakan bahwa pada pertemuan awal seseorang akan terdorong untuk membuat ramalan/prediksi dan penjelasan sebagai subproses penting pengurangan ketidakpastian. Prediksi/ramalan diartikan sebagai kesanggupan memprediksi satu perilaku dari berbagai pilihan perilaku yang ada bagi pribadi maupun orang lain. Penjelasan merujuk kepada usaha menginterpretasikan makna atas suatu tindakan yang dilakukan pada masa lampau dalam suatu hubungan.

Berger dan Calabrese berpendapat bahwa komunikasi adalah sarana yang digunakan individu untuk mengurangi ketidakpastian yang pada saatnya akan mengarah kepada pengembangan hubungan interpersonal/antarpribadi. Berger dan Bradac (dalam West dan Turner:

2018) kemudian mengelaborasi pendapat tersebut menjadi dua jenis ketidakpastian. Pertama, ketidakpastian kognitif (*cognitive uncertainty*) merupakan keadaan di mana tingkat ketidakpastian yang dimiliki oleh individu dikaitkan dengan keyakinan atau sikap yang dipercayai. Sementara itu, ketidakpastian perilaku (*behavioral uncertainty*) merupakan keadaan di mana perilaku seharusnya dapat diprediksi dengan mempertimbangkan norma atau budaya yang ada.

Berger dan Calabrese (dalam West dan Turner: 2018) selanjutnya menguraikan proses pengurangan ketidakpastian menjadi dua yakni proaktif dan retroaktif. Memikirkan pilihan komunikasi sebelum terlibat dalam percakapan dengan orang lain disebut dengan pengurangan ketidakpastian proaktif. Sedangkan ketidakpastian retroaktif merupakan usaha mengurangi ketidakpastian dengan menganalisa situasi setelah pertemuan terjadi.

Di samping itu, Berger dan Calabrese (dalam West dan Turner: 2018) menilai bahwa pengurangan ketidakpastian terkait dengan beberapa konsep yang bersumber dari komunikasi serta pengembangan hubungan yakni keluaran verbal, kenyamanan nonverbal (seperti intonasi yang ramah dan sikap tubuh yang cenderung mendekat), aktif mencari informasi (bertanya), terjadi timbal balik pengungkapan diri, kesukaan dan kemiripan. Teori pengembangan ketidakpastian berupaya menempatkan komunikasi sebagai landasan atas perilaku manusia, untuk itu sejumlah asumsi terkait komunikasi dan perilaku manusia mendasari teori tersebut.

Asumsi dasar teori pengurangan ketidakpastian Berger dan Calabrese (dalam West dan Turner: 2018):

- a. Stress kognitif dihasilkan seseorang yang mengalami ketidakpastian pada konteks komunikasi interpersonal. Saat menghadapi orang asing dan lingkungan yang baru, maka seseorang akan mengalami ketidakpastian dan menghasilkan perasaan tidak nyaman akan sesuatu yang dihadapinya.
- b. Meningkatkan prediktabilitas dan mengurangi ketidakpastian menjadi pokok perhatian saat bertemu dengan orang asing. Pada asumsi ini dijelaskan bagaimana seseorang menggali informasi terhadap orang lain yang kemudian informasi itu dapat digunakannya untuk selanjutnya meningkatkan prediksi dan mengurangi ketidakpastian.
- c. Komunikasi interpersonal adalah proses perkembangan yang terjadi melalui tahapan dan merupakan sarana utama pengurangan ketidakpastian. Ada tiga tahapan yang dilalui dalam perkembangan hubungan menurut Berger dan Calabrese (dalam West dan Turner: 2018) yakni: 1) tahap masuk diartikan sebagai tahapan di mana pada pertemuan awal antara orang asing, terdapat aturan serta norma (implisit maupun eksplisit); 2) tahap pribadi di mana individu mulai berinteraksi secara lebih spontan serta mulai mengungkapkan informasi yang lebih mendalam lagi; 3) tahap keluar merujuk kepada tindakan yang akhirnya diambil terkait akan berlanjut atau tidaknya suatu hubungan atau relasi di masa mendatang.

- d. Kuantitas dan sifat informasi yang dibagikan orang berubah sepanjang waktu.
- e. Adalah mungkin untuk memprediksi perilaku orang dengan cara yang seperti hukum.

Aksioma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: “pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian atau dalam suatu teori dapat dijelaskan sebagai suatu kebenaran yang ditarik dari penelitian sebelumnya.” Selanjutnya Berger dan Calabrese mengemukakan aksioma-aksioma dalam teori pengurangan ketidakpastian (dalam West dan Turner: 2018):

- a. Ketidakpastian akan berkurang apabila intensitas komunikasi semakin meningkat.
- b. Saat ekspresi nonverbal meningkat, ketidakpastian semakin menurun.
- c. Meningkatnya keinginan untuk mendapatkan informasi disebabkan oleh semakin tingginya ketidakpastian yang dimiliki.
- d. Menurunnya tingkat keintiman isi komunikasi dalam suatu hubungan disebabkan oleh tingkat ketidakpastian yang tinggi.
- e. Tingginya tingkat ketidakpastian menyebabkan tingginya tingkat timbal balik.
- f. Kemiripan antara individu mengurangi ketidakpastian sebaliknya, ketidakmiripan akan meningkatkan ketidakpastian.

- g. Ketidakpastian yang meningkat akan menyebabkan penurunan keinginan, ketidakpastian yang menurun menyebabkan peningkatan keinginan.
- h. Ketidakpastian berkaitan negatif dengan hubungan dengan jaringan sosial. Semakin banyak jaringan sosial yang tercipta dengan mitra pasangan kita, maka ketidakpastian akan berkurang.
- i. Semakin tinggi kepuasan dalam komunikasi, semakin sedikit ketidakpastian.

Dalam perkembangannya, teori pengurangan ketidakpastian mengalami beberapa penyempurnaan dan perluasan serta modifikasi pada cakupan-cakupan antara lain: aksioma tambahan (lihat aksioma h dan aksioma i), kondisi sebelumnya (anteseden), strategi, hubungan yang dikembangkan, media sosial dan konteks:

Berger berpendapat bahwa ketika mengusahakan pengurangan ketidakpastian, kita harus melihat pada tiga kondisi sebelumnya (anteseden):

- a. Kondisi ketika individu berpotensi memiliki apresiasi atau hukuman;
- b. Kondisi ketika perilaku individu yang tidak sesuai dengan harapan;
- c. Kondisi disaat individu mengantisipasi adanya interaksi dengan individu lain di masa yang akan datang.

Cakupan perluasan lainnya yakni strategi. Tiga strategi dalam perluasan teori ini antara lain:

- a. Strategi pasif: strategi ini digunakan untuk mencari informasi melalui pengamatan dengan tanpa menimbulkan ketidaknyamanan dari orang yang diamati, misalnya dengan mengamati saat individu tersebut sedang berkomunikasi dengan individu lain.
- b. Strategi aktif: pada strategi ini individu akan secara aktif berusaha mendapatkan informasi baik melalui riwayat hidup atau biografi atau dengan bertanya kepada orang lain yang telah telah terlebih dahulu mengenal orang tersebut.
- c. Strategi interaktif: strategi ini digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dengan terlibat dalam komunikasi interpersonal dengan orang asing. Strategi ini sebagai upaya untuk mencari pembenaran atau konfirmasi atas informasi yang telah diperoleh baik secara aktif maupun pasif terhadap lawan bicara.

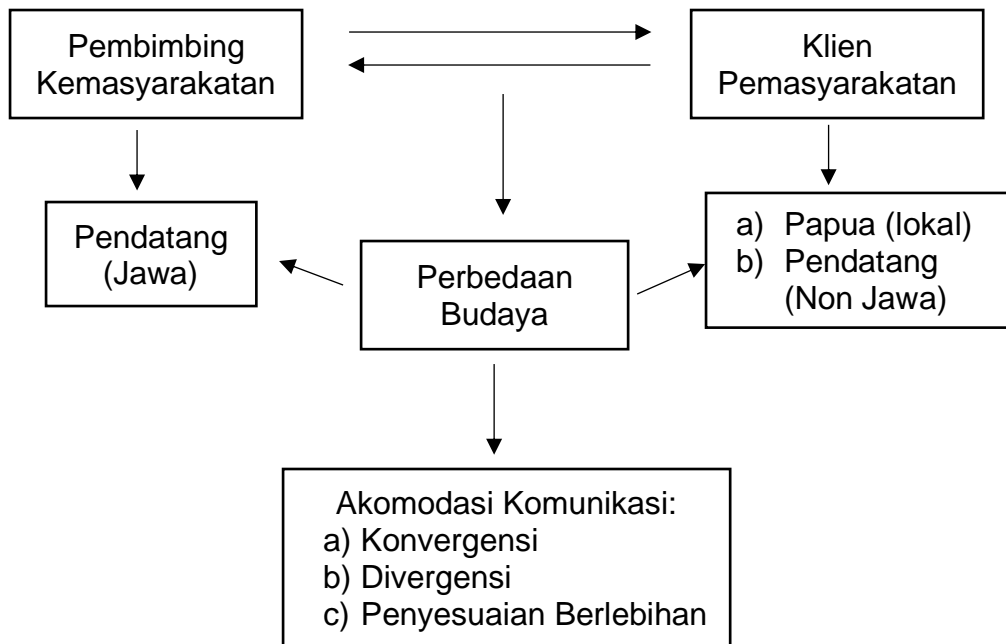
Cakupan selanjutnya yakni hubungan yang berkembang. Pada awalnya Berger dan Calabrese membatasi teori ini pada saat interaksi awal antarindividu, namun dengan mengikutsertakan tiga bentuk kondisi sebelumnya, teori ini kemudian menuntun kepada cakupan bahwa dalam pengembangan hubungan ketidakpastian dapat tercipta (ketidakpastian relational). Beberapa peneliti mendefinisikan ketidakpastian relational sebagai kurangnya ketidakpastian akan masa depan serta status suatu hubungan. Malcolm Parks dan Mara Adelman (dalam West dan Turner: 2018) melihat bahwa jaringan sosial seperti teman dan anggota keluarga seseorang dapat menjadi sumber untuk mendapatkan informasi.

Cakupan perluasan berikutnya yakni media sosial. Cakupan ini berkaitan dengan pengurangan ketidakpastian yang kini dapat dilakukan dengan menggunakan jejaring internet (media sosial).

Konteks merupakan cakupan perluasan terakhir dalam teori pengurangan ketidakpastian. Cakupan ini menyertakan konteks budaya yang melahirkan ketidakpastian. Gudykunst dan Tsukasa Nishida (dalam West dan Turner: 2018) membaginya ke dalam dua konteks: budaya konteks rendah (mayoritas makna ada pada pesan atau kode) dan budaya konteks tinggi (makna diinternalisasi oleh pendengar).

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam bagan pada halaman selanjutnya:



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran
Olahan peneliti: 2022

Definisi konseptual:

1. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pembimbing yang bertugas memberikan bimbingan kepada Narapidana.
2. Klien pemasyarakatan adalah seorang klien yang masih menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dan tetap melaksanakan bimbingan baik bimbingan kemandirian maupun bimbingan kepribadian.
3. Pondatang: orang yang tidak berasal dari daerah tempat dia berada atau berdomisili.
4. Lokal: orang yang berasal dari daerah tempat dia berada/berdomisili.
5. Perbedaan budaya: hal berbeda tentang sikap, perilaku, agama, dan bahasa.

6. Akomodasi komunikasi: penyesuaian yang dilakukan saat berkomunikasi dengan lawan bicaranya.
7. Konvergensi: bentuk akomodasi yang dilakukan dengan menyesuaikan bahasa lawan bicara.
8. Divergensi: bentuk akomodasi yang menonjolkan perbedaan.
9. Penyesuaian berlebihan: bentuk penyesuaian yang dilakukan secara berlebihan sehingga terkesan mengejek.